PASTIKAN MUTU PENILAIAN, OMBUDSMAN SULSEL LAKUKAN SUPERVISI PENGUMPULAN DATA DI KABUPATEN WAJO

Jum'at, 28 November 2025 - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan

Wajo - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan supervisi atas proses pengambilan data Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 pada 26-27 November 2025. Supervisi ini dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan bersama tim, dengan lokasi pengawasan meliputi RSUD Lamadukelleng, Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Polres Wajo, dan Rutan Kelas IIB Sengkang.

Kegiatan ini bertujuan memastikan pelaksanaan Opini Ombudsman RI dan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), serta menjamin mutu dan akurasi hasil penilaian di seluruh unit layanan yang menjadi objek pemeriksaan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan Ismu Iskandar, menyampaikan bahwa supervisi merupakan langkah krusial dalam menjamin kualitas proses penilaian. "Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan pengumpulan data berjalan objektif, terukur, dan sesuai standar. Hasil penilaian ini nantinya menjadi dasar penting dalam mendorong perbaikan layanan publik di Wajo," ujarnya.

Tahun 2025, Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik mengalami pengembangan signifikan dibandingkan Survei Kepatuhan yang sebelumnya menjadi instrumen utama Ombudsman RI. Tidak hanya menilai kepatuhan administratif, penilaian tahun ini juga mengukur potensi dan bentuk maladministrasi secara langsung melalui observasi, verifikasi, serta pendalaman proses layanan. Selain itu, Ombudsman RI menambahkan komponen baru berupa trust survey wawancara langsung kepada Masyarakat penggunala layanan public untuk menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan publik.

Dengan penguatan mekanisme penilaian ini, Ombudsman RI berharap hasil supervisi dan pengumpulan data di Kabupaten Wajo dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi faktual pelayanan publik serta mendorong percepatan perbaikan pada unit-unit layanan strategis di daerah.